
DAMPAK INFLASI, IHK, IPM, NILAI PRODUKSI, TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO UMKM DI KOTA SEMARANG

Oleh

Juni Mashita¹, Vella Anggresta²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI

Email : ¹junimashita11@gmail.com, ²vellaanggresta@gmail.com

Article History:

Received: 02-10-2022

Revised: 17-11-2022

Accepted: 20-11-2022

Keywords:

Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Nilai Produksi, Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

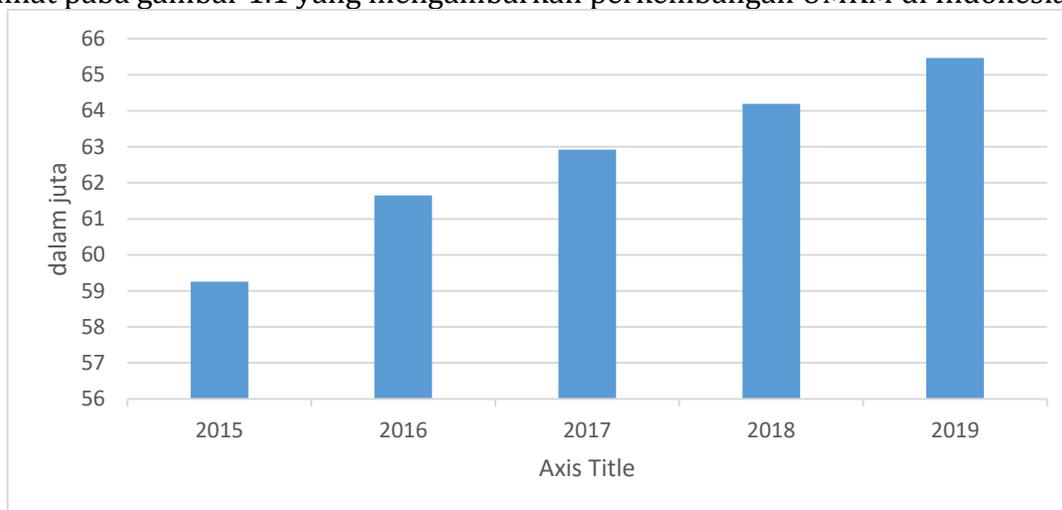
Abstract: Badan Pusat Statistik menyatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. UMKM di Indonesia seringkali menjadi sorotan dan memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini karena sebagian besar pelaku usaha di Indonesia merupakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan Software IBM SPSS Statistik 25 yang mendukung pengolahan data tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi, IHK, IPM, nilai produksi dan tenaga kerja terhadap PDRB UMKM di Kota Semarang. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS). Berdasarkan nilai t-statistic, tingkat inflasi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan, namun nilai IHK, IPM dan nilai produksi berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB. Demikian juga berdasarkan nilai F-statistic, pengaruh inflasi, IHK, IPM, nilai produksi dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh terhadap PDRB.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu pondasi perekonomian nasional. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM di Indonesia seringkali menjadi sorotan dan memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini karena sebagian besar pelaku usaha di Indonesia merupakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan aktivitas kegiatan

pekerjaan yang memiliki efek penting dalam memperbaiki sektor perekonomian di Negara Indonesia. Baik dari segi bidang kegiatan atau usaha yang telah tersedia maupun dari segi jumlah usahanya (Hamidah, Sejati, & Mujahidah, 2019).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun 2019 mencapai 65,47 juta unit. Hal ini terlihat pada gambar 1.1 yang menggambarkan perkembangan UMKM di Indonesia.



Sumber : Kemenkop UKM

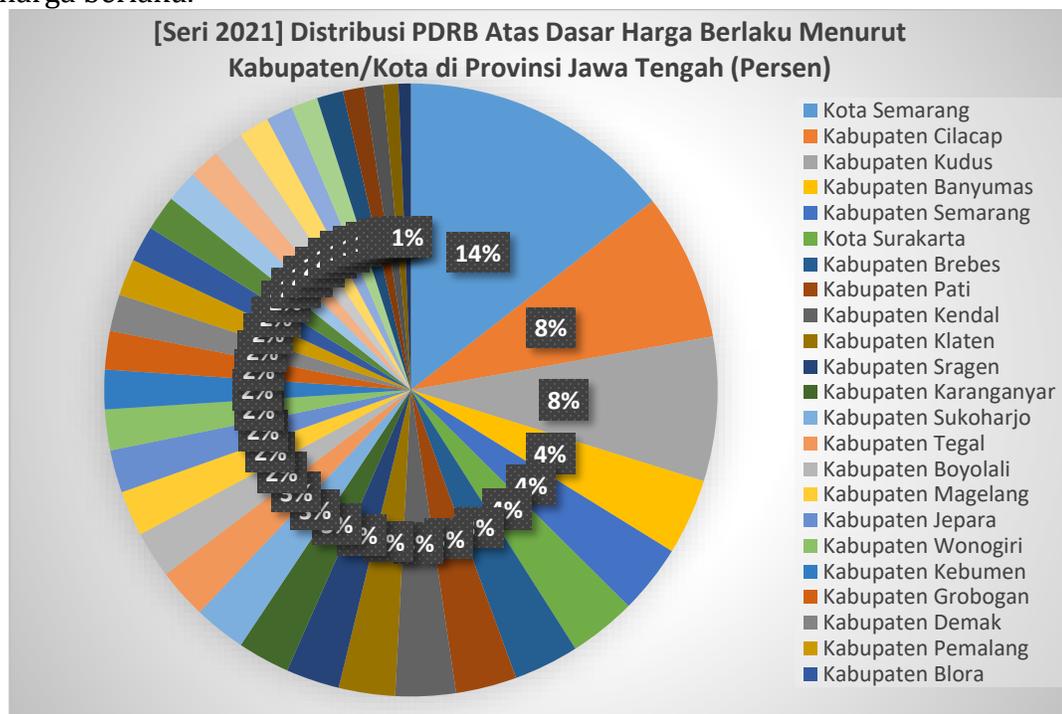
Gambar 1.1

Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia

Pendukung terbesar perekonomian Indonesia adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global seperti saat ini (Sarfiyah, Atmaja, & Verawati, 2019). Melihat potensi UMKM tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah sehingga dapat lebih mandiri dan berdaya. Peran dari berbagai pihak seperti Pemerintah, Swasta, perbankan, Perguruan Tinggi, dan berbagai asosiasi bisnis sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan sektor UMKM. Walaupun perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat, pelaku UMKM seringkali masih menghadapi sejumlah kendala salah satunya dari segi pendanaan. Hal ini disebabkan karena literasi keuangan dan pembiayaan UMKM di Indonesia sendiri masih rendah.

Pembangunan merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mempengaruhi masa depannya kearah lebih baik dari taraf hidup sebelumnya (Sarfiyah, Atmaja, & Verawati, 2019). (Sarfiyah, Atmaja, & Verawati, 2019) Pembangunan dalam era globalisasi seperti saat ini sangat mengandalkan sektor ekonomi sebagai dasar menentukan keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan yang tidak merata dan hanya

mengandalkan pertumbuhan yang terpusat dengan tidak diimbangi kehidupan sosial dan ekonomi maka pertumbuhan akan rapuh. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika pada gambar 1.2 kita dapat melihat distribusi PDRB atas dasar harga berlaku.



Sumber: Kemenkeu

Gambar 1.2

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2021

Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah inflasi, IHK, IPM, nilai produksi dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh terhadap PDRB?
2. Apakah inflasi, IHK, IPM, nilai produksi dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh terhadap PDRB?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui secara parsial inflasi, IHK, IPM, nilai produksi dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh terhadap PDRB UMKM di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui secara parsial inflasi, IHK, IPM, nilai produksi dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh terhadap PDRB UMKM di Kota Semarang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

1. Bagi pemerintah, penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Bagi peneliti, penulisan ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembanding dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Badan Pusat Statistik menyatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung. Tingginya nilai PDRB mencerminkan pesatnya pertumbuhan ekonomi, dan dapat dikatakan perekonomian daerah mengalami kemajuan.

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode, yang merupakan salah satu indikator yang amat penting, dalam menilai kinerja suatu perekonomian dan tingkat kesejahteraan penduduk (Istiyani, Viphindrartin, Nurhardjo, & Restiawan, 2022). PDRB pada dasarnya adalah jumlah barang serta jasa yang diproduksi oleh semua entitas di suatu negara tertentu, atau nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh semua entitas (Hannyfah, 2022).

Inflasi

Bank Indonesia menyatakan Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melihat kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul akibat adanya tekanan dari sisi permintaan dan penawaran atas tingginya permintaan barang dan jasa yang tidak sebanding dengan ketersediaannya.. Ketika tingkat inflasi suatu negara meningkat maka impor barang menurun dan apabila tingkat inflasi menurun maka impor barang akan mengalami peningkatan (Widiya, Siregar, & Hilmiatussahla, 2019). (Ronaldo, 2019) menyatakan inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (deflation). Menurut Bick dalam *Threshold Effect of Inflation on Economic Growth in Developing Countries*, menyatakan bahwa terjadi hubungan yang signifikan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi pada sebuah negara dapat diartikan bahwa ekonomi negara tersebut buruk.

Indeks Harga Konsumen

Badan Pusat Statistik menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu

indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. (Nurfadilah, Budi, Kurniati, & Suhaedi, 2022) menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) nilainya tidak selalu stabil setiap bulannya akan mengalami perubahan. Permasalahan yang ditemui yaitu jika terjadi penurunan harga atau deflasi bisa sangat menguntungkan bagi para konsumen tapi jika terus menerus akan merugikan untuk para produsen, sedangkan kenaikan harga atau inflasi jika terus menerus meningkat akan sangat merugikan bagi konsumen terutama masyarakat kalangan menengah.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, kemampuan membaca, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat, yaitu: IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Nilai Produksi (Output)

(Badan Pusat Statistik, 2022) menyatakan output adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri yang terdiri dari: barang-barang yang dihasilkan dari proses produksi dan jasa industri yang diterima dari pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon).

Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar. Pekerja Produksi adalah pekerja yang langsung bekerja dalam proses produksi atau berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan. Pekerja lainnya adalah pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung perusahaan, seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, supir perusahaan, dll.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik dengan periode 2017-2021. Menurut (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengambilan data di BPS dikarenakan mempertimbangkan informasi yang akurat, kemudahan akses, waktu dan biaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, metode digunakan untuk melihat pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Metode analisis data adalah salah satu komponen penting dalam proses analisis data, dimana

data yang dikumpulkan merupakan bagian dari proses analisis data yang dikumpulkan kemudian diolah untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Peneliti menggunakan pendekatan yang menggunakan pendekatan angka atau kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder.

Metode lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu cara pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari daerah penelitian tersebut (Singarimbun, 1991). Pemilihan Kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena UMKM pada kota ini menyumbang 14% PDRB atas dasar harga bahan baku pada Provinsi Jawa Tengah dan merupakan penyumbang terbesar. Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah merupakan kota pusat perdagangan dan industri dengan sektor-sektor unggulan. Hal ini dapat diartikan pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya nilai PDRB mencerminkan pesatnya pertumbuhan ekonomi, dan dapat dikatakan perekonomian daerah mengalami kemajuan. PDRB pada dasarnya adalah jumlah barang serta jasa yang diproduksi oleh semua entitas di suatu negara tertentu, atau nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh semua entitas (Hannyfah, 2022). Berikut ini akan dijelaskan seberapa besar pengaruh inflasi, IHK, IPM, nilai produksi dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh terhadap PDRB UMKM di Kota Semarang.

Berdasarkan data dapat dilihat titik terendah produk domestik regional bruto terjadi pada tahun 2017 sebesar 13,68% dan titik tertinggi produk domestik regional bruto terjadi pada tahun 2021 sebesar 14,45%. Inflasi mengalami titik terendah pada tahun 2020 dengan nilai 1,68% dan titik tertinggi berada pada tahun 2017 dengan nilai 3,61%. Menurut data BPS tingginya inflasi pada tahun 2005 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada semua kelompok barang dan jasa salah satunya adalah bahan konsumsi. Indeks harga konsumen mengalami nilai terendah pada tahun 2020 dan mengalami titik tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai 136,59%. Indeks pembangunan manusia memiliki nilai terendah pada tahun 2017 dengan nilai 82,01% dan mengalami titik tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 83,55%. Nilai produksi (*output*) memiliki nilai terendah pada tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi pada tahun 2017 dengan nilai 602.462.437 Juta Rupiah. Jumlah tenaga kerja memiliki nilai terendah pada tahun 2019 sebesar 2.212.238 Orang dan memiliki nilai tertinggi pada tahun 2017 dengan nilai 7.660.091 Orang.

Tabel 4. 1
Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	B	Sig. T
(<i>constant</i>)	0.010	0.895
Inflasi	3.649	0.000
IHK	0.003	0.152
IPM	0.646	1.287
Output	-0.009	0.471
TK	-0.876	0.003

Sig. F	0.001
Adjusted R Square	0.600

Sumber : SPSS 25 (data olah)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- a. Nilai R Square sebesar 0,60 yang berarti bahwa 60% variasi atau perubahan dalam impor barang konsumsi dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen inflasi, IHK, IPM, nilai produksi dan tenaga kerja, sedangkan 40% sisanya dijelaskan oleh variabel lain
- b. Berdasarkan uji simultan diketahui bahwa variabel independen mempunyai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ hal ini berarti secara parsial berpengaruh terhadap PDRB
- c. Hasil pengujian terhadap variabel inflasi memiliki koefisien regresi sebesar 3,649 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada variabel inflasi akan mengakibatkan perubahan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan inflasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDRB.
- d. Hasil pengujian terhadap variabel indeks harga konsumen memiliki koefisien regresi sebesar 0,003 dengan tingkat signifikansi $0,152 > 0,05$. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada variabel IHK akan mengakibatkan perubahan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan IHK tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDRB.
- e. Hasil pengujian terhadap variabel indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki koefisien regresi sebesar 0,646 dengan tingkat signifikansi $1,287 > 0,05$. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada variabel IPM akan mengakibatkan perubahan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan IPM tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDRB.
- f. Hasil pengujian terhadap variabel nilai produksi memiliki koefisien regresi sebesar -0,009 dengan tingkat signifikansi $0,471 > 0,05$. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada variabel nilai produksi akan mengakibatkan perubahan positif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan variabel nilai produksi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDRB.
- g. Hasil pengujian terhadap variabel tenaga kerja memiliki koefisien regresi sebesar -0,876 dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada variabel tenaga kerja akan mengakibatkan perubahan negatif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), dan variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap PDRB.

KESIMPULAN

Berdasarkan nilai *t-statistic*, inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan PDRB pada Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan jika angka inflasi tinggi maka pertumbuhan PDRB meningkat. Indeks Harga Konsumen (IHK) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan PDRB pada Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan jika angka IHK tinggi maka pertumbuhan PDRB meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan PDRB pada

Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan jika pertumbuhan IPM meningkat maka pertumbuhan PDRB meningkat. Nilai produksi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan PDRB pada Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan jika nilai produksi meningkat maka menurunkan PDRB. Tenaga kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan PDRB pada Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan jika angka tenaga kerja meningkat maka menurunkan PDRB.

SARAN

Diharapkan bagi Pemerintah bisa membuat kebijakan yang membuat UMKM mampu menaikkan hasil produksinya, mungkin bisa dengan melakukan pengawasan harga sehingga harga bahan produksi yang dibutuhkan UMKM selalu stabil. Pemerintah perlu merangsang dan mendukung terciptanya lapangan pekerjaan baru, dengan memperhatikan usaha kecil, dan menengah (UKM) karena pada sektor itulah orang menganggur banyak bekerja. Pemerintah juga perlu memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan khusus untuk mempermudah pengembangan usaha baik salah satunya dalam pemberian kredit usaha dan selalu mendampingi UMKM agar memperhitungkan kondisi tersebut sehingga tidak terjebak pada utang yang justru akan bias mematikan usahanya.

Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah periode tahun pengamatan dan jumlah variabel seperti selain variabel yang diterapkan sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, hal-hal yang disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah agar peneliti berikutnya dapat memperluas objek penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih objektif lagi. Penelitian selanjutnya mungkin juga dapat meneliti juga hasil impor barang dan jasa lain untuk dapat membandingkan secara konseptual pengaruh ekspor dan impor secara terintegrasi.

DAFTAR PUSTKA

- [1] Badan Pusat Statistik. (2022). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- [2] Bahtiar, R. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya. *Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- [3] Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., & Astuti, P. (2015). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Gadjah Mada University Press.
- [4] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi VIII*. Semarang: Universitas Dioponogoro.
- [5] Hamidah, Q., Sejati, A., & Mujahidah, A. (2019). The Development Of Small And Medium Businesses (Msmes) Based On Tecnology To Deal With The Industrial Revolution 4.0. *Social, Humanities, And Educational Studies (Shes): Conference Series*.
- [6] Hannyfah, M. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi, Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia . *Skripsi, Universitas Bung Hatta*.
- [7] Istiyani, N., Viphindrartin, S., Nurhardjo, B., & Restiawan, A. (2022). Analisis PDRB, Upah Minimum Kabupaten, dan Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa

- Timur. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*.
- [8] Malini, K., & Herawati, N. (2021). Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan Software Akuntansi, Dan Human, Capital Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM Di Kecamatan Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*.
- [9] Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- [10] Nurrahma, F., Khotimah, K., & Islamay, S. V. (2022). Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pelaku. *JDEP*, 69-78.
- [11] Ronaldo, R. (2019). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Borobudur*.
- [12] Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Vol 4 No.2*.
- [13] Singarimbun, M. (1991). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : LP3S.
- [14] Sudarmanto. (2009). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [15] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [16] Syarifah, E., Purnamasari, S., & Purnomo, A. (2020). Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN